

PERBANASNews

No. 153 Tahun 2024 | Oktober - Desember 2024

Outlook Ekonomi 2025

Perbankan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

**Program Asta Cita Butuh
Dukungan Perbankan**

oleh Dian Ediana Rae

**Bank Digital Di antara Euforia,
Harapan dan Kenyataan.**



PerbanasNews

No. 153 Tahun 2024
Oktober - Desember 2024

PENERBIT

Perhimpunan Bank Nasional
(PERBANAS)

PELINDUNG

Badan Pengurus Perbanas

REDAKSI

Anika Faisal
Aviliani

REDAKTUR PELAKSANA

Eka Sri Dana Afriza
Andry Asmoro
Enrico Tanuwidjaja

SIRKULASI

Wara Sri Indriani

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN

Cover

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna
• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00
• ½ halaman: Rp2.000.000,00

PERBANASNews menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, display produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339
website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS

MENPEN No. 1882/SK/DITJEN
PPG/STT/1993,
2 September 1993

Kinerja industri perbankan menunjukkan tren positif di tengah dinamika ekonomi global. Pasca pandemi, pertumbuhan kredit perbankan melonjak dengan angka dua digit, sementara penghimpunan dana pihak ketiga mulai pulih. Likuiditas perbankan terjaga, didukung rasio AL/NCD dan AL/DPK yang jauh di atas ambang batas. Kualitas aset juga terus membaik, tercermin dari penurunan rasio kredit bermasalah (NPL), yang mencerminkan pengelolaan risiko yang semakin solid.

Namun, tantangan tetap ada. Ketidakpastian suku bunga global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan eskalasi perang dagang menjadi faktor risiko yang perlu diperhatikan. OJK mengingatkan perbankan untuk tetap waspada terhadap tekanan pasar dan likuiditas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Meski demikian, PERBANAS memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2025 sebesar 10,6% (yoy), didorong oleh fundamental perbankan yang kuat dan kebijakan moneter yang akomodatif. Inovasi digital dan inklusi keuangan diperkirakan akan mendorong pertumbuhan kredit di tahun mendatang.

Sektor keuangan syariah juga berkembang pesat, dengan Indeks Literasi Keuangan Syariah yang meningkat tajam menjadi 39,11% pada 2024, mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin besar terhadap prinsip keuangan syariah. Peran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta berbagai inisiatif lainnya mempercepat perkembangan industri ini.

Perbankan diharapkan terus berkontribusi mendukung realisasi Asta Cita, visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan memberikan dukungan terhadap UMKM, menyediakan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan meningkatkan skala bisnis, sehingga semakin memperkokoh peran sektor perbankan sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Selamat membaca!

Daftar Isi

PERBANAS UTAMA

04 **Prospek Perbankan di Tengah Isu Likuiditas, Ketidakpastian Ekonomi dan Tekanan Global**

Pertumbuhan fungsi intermediasi perbankan dalam beberapa tahun terakhir selalu melebihi penghimpunan dana pihak ketiga.



PERBANAS UTAMA

08 **Bank Digital Di antara Euforia, Harapan dan Kenyataan**

Harga saham bank-bank kecil melambung bersamaan dengan tingginya minat investor yang melakukan akuisisi dan konversi.

INTERVIEW

13 **Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia**

Sutan Emir Hidayat - Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

INTERVIEW

04 **Program Asta Cita Butuh Dukungan Perbankan**

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022–2027



KEGIATAN



22 **Kegiatan KOMITE MASYARAKAT PERBANKAN PEDULI (KMPP) PERBANAS**



23 **Seminar Kesehatan PERBANAS Kediri-Madiun**

23



23 **Perbanas Sulawesi Selatan Bakti Sosial**

24 **PERBANAS Aksi Penghijauan di Wonorejo**

24



SUPLEMEN

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

PT. Jotun Indonesia	12
Bank Raya	25
Bank Syariah Indonesia	25

Prospek Perbankan di Tengah Isu Likuiditas, Ketidakpastian Ekonomi dan Tekanan Global

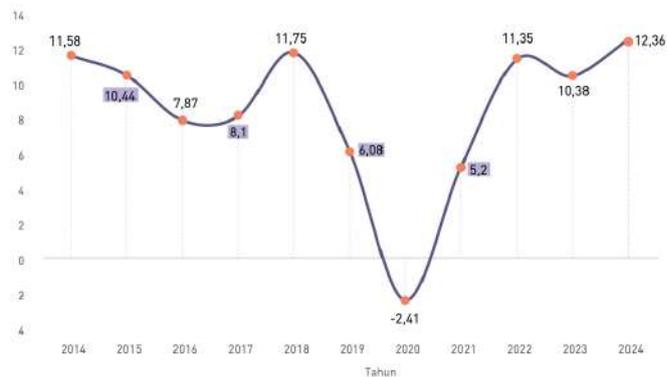
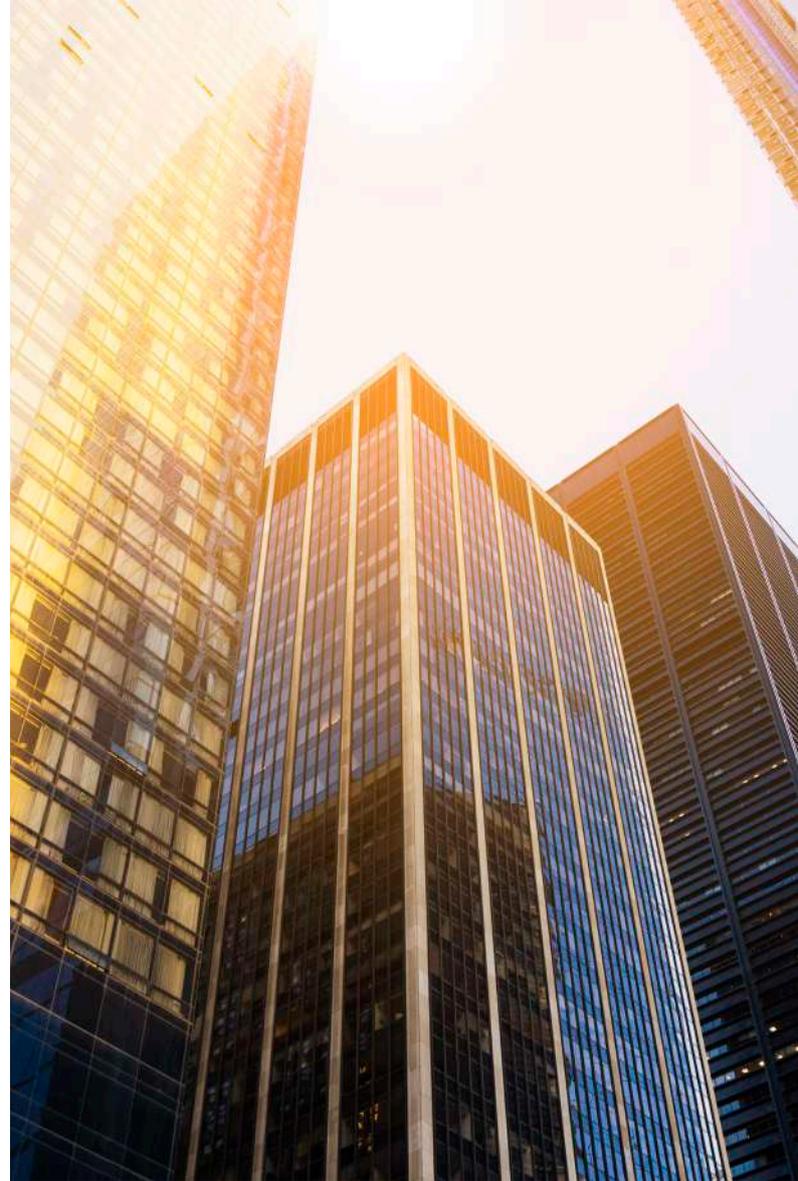
Kurva kinerja industri keuangan terus menunjukkan tren positif pasca krisis Covid-19.

Pertumbuhan fungsi intermediasi perbankan dalam beberapa tahun terakhir selalu melebihi penghimpunan dana pihak ketiga. Dari perspektif sebaliknya, situasi tersebut mencerminkan pengetatan likuiditas.

Sebuah situasi yang kerap terulang pasca krisis, di mana bank, sektor riil dan pemerintah cenderung lebih ekspansif, sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Berdasarkan data yang dikompilasi Perbanas, pertumbuhan kredit perbankan dalam 3 tahun terakhir berada di level dua digit. Indikator ini merupakan titik balik dari penurunan kredit pada saat Covid-19.

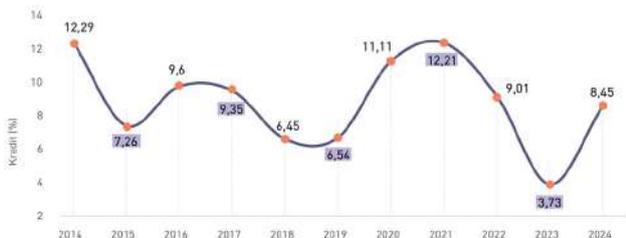
Pada 2020 penyaluran kredit sempat merosot -2,41% (year-on-year/yoy). Kemudian fungsi intermediasi mulai naik pada 2021, meskipun masih di level satu digit, yakni 5,2%. Pada 2022 penyaluran pembiayaan perbankan melesat 11,35% (yoy), pada 2023 naik sebesar 10,38% (yoy) dan pada tahun lalu 10,39% (yoy).



Derasnya penyaluran kredit tidak diimbangi dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Padahal, saat wabah Covid-19 melanda pertumbuhan DPK sempat dua digit, yakni 11,11% (2020) dan 12,21% (2021). DPK tumbuh pesat karena masyarakat menunda konsumsi sejalan dengan pembatasan aktivitas sosial.

Namun, ketika Covid-19 mereda, saat denyut ekonomi mulai bergerak, penghimpunan likuiditas perbankan berbalik melambat. Pada 2022, DPK tercatat naik 9,01% (yoy) dan pada 2023 nyaris stagnan, dengan pertumbuhan 3,73% (yoy). Pada 2024 tren penghimpunan dana mulai naik sebesar 8,45% (yoy--data September), tapi masih di bawah penyaluran kredit.

Meskipun laju pertumbuhan DPK lebih lambat dari kredit, kondisi likuiditas perbankan terpantau memadai. Hal itu tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 113,64% dan 25,58%, jauh di atas *threshold* masing-masing 50% dan 10%.



Kualitas aset perbankan terus mengalami perbaikan. Risiko kredit terpantau membaik dengan rasio kredit bermasalah (net performing loan/NPL) gross yang menurun menjadi sebesar 2,2% per Oktober 2024 dan NPL *net* stabil, yaitu 0,77%.

NPL perbankan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan 4 tahun lalu. Saat Covid-19 melanda, rasio kredit bermasalah tanpa restrukturisasi sempat menyentuh angka 17,50% per Desember 2020. Namun, dengan kebijakan restrukturisasi, rasio NPL pada periode itu hanya sebesar 3,06%. Kini tanpa ada restrukturisasi kondisi NPL perbankan jauh berada di bawah rasio tersebut.

Tingkat permodalan perbankan pun semakin solid. Rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*/CAR) mencapai 27,02% pada akhir 2024. Meskipun menurun dari tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan ATMR yang naik 9,44% (yoy), karena kenaikan kredit melampaui pertumbuhan modal.



Adapun laba perbankan pada 2024 menunjukkan tren positif. Data OJK menyebutkan, hingga September laba bersih industri perbankan mencapai Rp194,97 triliun, naik 8,04% secara tahunan dari sebelumnya Rp180,47 triliun pada September 2023.

Hingga September laba bersih industri perbankan mencapai Rp194,97 triliun, naik 8,04% secara tahunan dari sebelumnya Rp180,47 triliun pada September 2023.

MEWASPADAI SITUASI GLOBAL

Pada tutup tahun lalu, OJK menyampaikan pesan bahwa ke depan industri perbankan tetap perlu mencermati risiko pasar dan likuiditas di tengah potensi ketidakpastian ekonomi global. Hal itu mulai dari ketidakpastian suku bunga, perkembangan ekonomi China, serta perang tarif yang mengarah perang dagang, sehingga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ekonomi domestik.

Akan tetapi, otoritas melihat ekonomi nasional tetap solid pada 2025. Dengan ditandai terjaganya keyakinan konsumen, terkendalinya inflasi dan surplus neraca perdagangan, kebijakan pemerintah yang akomodatif, serta pembangunan proyek strategis nasional.

Kinerja perbankan diyakini akan tetap terjaga seiring dengan pengumpulan DPK yang diproyeksikan meningkat. Hal itu tecermin dari tren kenaikan likuiditas perbankan jelang tutup tahun.

Adapun penyaluran kredit perbankan diproyeksi akan terus ekspansif, terutama ke sektor yang memiliki *multiplier effect* dan menyerap banyak tenaga kerja, seperti sektor perdagangan besar dan industri pengolahan.

OJK meramalkan pertumbuhan kredit perbankan berada pada rentang 11%-13% pada 2025. Proyeksi tersebut selaras dengan prediksi Bank Indonesia. Bank sentral meramalkan pertumbuhan kredit di level 11%-13% akan terjadi hingga 2026.

STIMULUS KE PERBANKAN

Namun, OJK menyebutkan pertumbuhan kredit pada rentang 11%-13% akan terjadi bila ada pemangkasan suku bunga acuan The Fed atau Fed Fund Rate dengan diikuti oleh penyesuaian BI Rate.

Penyesuaian suku bunga acuan itu dibutuhkan untuk menurunkan biaya dana sehingga berdampak positif pada profitabilitas bank. Harapan tersebut dijawab langsung oleh bank sentral dengan memangkas BI Rate menjadi 5,75%, dari sebelumnya 6%, pada awal tahun ini.

Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan BI memangkas suku bunga, yakni rupiah yang stabil, survei sejumlah

indikator ekonomi yang menunjukkan pelemahan konsumsi yang disertai angka inflasi di batas bawah $2,5\pm 1\%$, dan arah kebijakan AS/The Fed yang lebih jelas.

Pemangkasan suku bunga ini di luar konsensus para ekonom. Namun, menjadi angin segar bagi industri perbankan dan sektor riil. Terlebih lagi BI juga mengguyur likuiditas perbankan dengan insentif kebijakan makroprudensial (KLM).

Hingga pekan kedua Januari 2025, BI tercatat membalikkan likuiditas ke sistem perbankan sebesar Rp295 triliun, meningkat Rp36 triliun dari posisi Oktober 2024. Insentif ini telah disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp129,1 triliun, bank swasta Rp130,6 triliun, BPD sebesar Rp29,9 triliun, dan bank asing sebesar Rp5 triliun.

Antusiasme para bankir pun menyambut penurunan suku bunga acuan. Penurunan BI Rate diharapkan menurunkan 'tensi' perang suku bunga sehingga mendorong pelonggaran likuiditas perbankan.

Namun, penurunan BI Rate diyakini tidak akan signifikan apabila tidak dibarengi dengan pemangkasan suku bunga dan porsi instrumen Sekuritas Rupiah BI (SRBI). Hal itu akan mendorong jumlah uang beredar akan meningkat di sistem perbankan dan masyarakat.

Sektor utama yang akan terdampak penurunan suku bunga pada tahun ini adalah konsumen.

Mulai dari penyaluran kredit pemilikan rumah dan apartemen, kredit multiguna, serta kredit kendaraan bermotor.

Berdasarkan survei BI, prospek kredit pada tahun ini akan banyak mengucur pada sektor perdagangan besar dan eceran, lantas diikuti sektor industri pengolahan serta sektor perantara keuangan.

Selain itu, arah kebijakan pemerintah pada swasembada pangan, energi dan hilirisasi akan mendorong perbankan menyalurkan kredit pada sektor tersebut.

Adapun bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diramalkan masih akan berat. Apalagi pada tahun lalu penyaluran kredit UMKM menyentuh rekor pertumbuhan terendah selama 10 tahun, yakni hanya naik 3,37% (yoy).

Residu pelemahan bisnis usaha kecil pasca Covid-19 masih menjadi momok penyaluran kredit UMKM melambat. Apalagi ada kenaikan risiko NPL setelah relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit UMKM era pandemi yang berakhir pada Maret 2024.

Perbankan melakukan *selective lending* pada kredit UMKM, terutama segmen usaha mikro, sebagai upaya konsolidasi untuk menahan peningkatan risiko kredit. Diperlukan stimulus dari pemangku kepentingan untuk menggairahkan kembali usaha 'wong cilik' ini.

Bank Digital Di antara Euforia, Harapan dan Kenyataan

Euforia bank berbasis teknologi atau bank digital pernah mencapai puncaknya pada era pandemi COVID 19. Harga saham bank kecil melambung bersamaan dengan tingginya minat investor melakukan akuisisi dan konversi. Fenomena itu juga mendorong sejumlah bank besar membangun ulang aplikasi dan memodernisasi layanan internet banking dengan adopsi teknologi digital mutakhir.

Bank berbasis teknologi memantik euforia karena sangat relevan dengan situasi zamannya. Pembatasan sosial kala pandemi mendorong masyarakat menggunakan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Termasuk pemenuhan layanan finansial. Kebiasaan baru itu mengubah cara pandang masyarakat dalam berbank dengan menempatkan konsumen sebagai sentral. Bank berupaya mengikuti dan beradaptasi agar tetap relevan.

Setelah melewati euforia, kehidupan masyarakat kembali normal dan perubahan situasi makro, bank digital kini menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Kinerja bank berbasis teknologi atau bank digital melanjutkan tren pertumbuhan yang pesat. Sampai dengan November 2024, pertumbuhan kredit maupun Dana Pihak Ketiga (DPK) melampaui rata-rata industri perbankan.

Dari 11 bank digital yang sudah memiliki aplikasi digital banking, rata-rata pertumbuhan kredit mencapai 52% (yoy), jauh di atas rata-rata pertumbuhan kredit industri di 10,79% (yoy). Di samping itu, rata-rata pertumbuhan DPK mencapai 162% (yoy), jauh melampaui rata-rata penghimpunan DPK industri di 7,54% (yoy).

Kinerja bank digital yang pesat tersebut merupakan buah dari transformasi yang dilakukan oleh manajemen dari bank konvensional menjadi bank berbasis teknologi dalam empat tahun terakhir. Dalam waktu yang relatif singkat, bank digital mampu menggaet jutaan nasabah. Misalnya, Bank Neo Commerce memiliki jumlah nasabah 26 juta (per Juni 2024), Seabank 15 juta (per Oktober 2024), dan Jago 14 juta (per September 2024).



Ringkasan Kinerja Bank Digital

November 2024
Dalam Rp miliar

Bank	Aset	Kredit	DPK
Seabank	33,410	21,470	25,827
Jago	27,201	17,979	17,259
BNC	17,634	8,478	13,302
BCA Digital	15,857	5,875	11,102
Allo Bank	15,157	7,518	5,278
Bank Jasa Jakarta	12,944	5,019	6,168
Bank Raya	12,854	6,577	7,775
Super Bank	10,613	5,894	4,424
Bank Aladin	8,782	4,641	5,120
Krom Bank	6,359	3,802	2,855
Amar Bank	4,914	3,006	1,041

Di sisi lain, mayoritas bank digital juga telah mampu mencetak laba bersih per November 2024. Sebanyak 9 dari 11 bank digital mencetak laba berkisar Rp11,23 miliar hingga Rp476 miliar. Adapun tiga bank digital masih menelan kerugian, yaitu Bank Aladin (Rp-76,9 miliar), Bank Jasa Jakarta (Rp-313,5 miliar), dan Super Bank (Rp-388 miliar).

Secara umum, iklim usaha di tahun 2025 diperkirakan bakal menghadapi masa transisi seiring dengan perubahan arah kebijakan dari pemerintahan baru. Kendati demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memproyeksi pertumbuhan kredit di tahun 2025 di kisaran 11%-13%, lebih tinggi dibandingkan 2024 di kisaran 9%-11%.

Menurut OJK, pelanggaran kebijakan moneter tahun ini diperkirakan bakal menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan kredit di dalam negeri. The Federal

Reserve diperkirakan bakal kembali menurunkan suku bunga the Fed Fund Rate sebesar 50 bps, lebih rendah dari perkiraan awal di 75 bps-100 bps. Sepanjang 2024, The Fed telah tiga kali menurunkan suku bunga dengan total pemangkasan sebesar 100 bps menjadi 4,25%-4,5% dari sebelumnya di angka 5,25%-5,5%.

Sementara itu, level BI rate pada 2024 bertahan di 6%. BI tercatat menaikkan BI Rate 25 bps di Maret 2024 dan menurunkan BI rate dengan besaran yang sama di September 2024. BI menyatakan pada stance kebijakan untuk menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi. Untuk itu, BI tetap mencermati peluang penurunan suku bunga sejalan dengan inflasi yang terkendali guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1%. Beberapa lembaga internasional seperti IMF, ADB, dan OECD memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5% pada tahun ini. Hal itu antara lain didukung oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga, inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, dan kebijakan pemerintah yang akomodatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, arah perekonomian global menghadapi ketidakpastian seiring terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden AS pada pemilu November 2024 lalu. Trump yang pernah menjadi presiden AS (2016-2020) di-

perkirakan bakal menerapkan kebijakan proteksi dengan menaikkan tarif impor.

Trump baru-baru ini juga mengancam pengenaan tarif impor 100% bagi negara-negara anggota BRICS apabila meningkatkan transaksi non dolar dan penguatan mata uang lokal. Indonesia secara resmi diumumkan sebagai anggota penuh aliansi ekonomi BRICS pada awal Januari 2025. Blok ini dibentuk oleh Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan pada 2006.

Kebijakan suku bunga akan berdampak langsung terhadap kinerja perbankan, baik dalam menyalurkan dana maupun menghimpun dana.

TANTANGAN

Kebijakan suku bunga akan berdampak langsung terhadap kinerja perbankan, baik dalam menyalurkan dana maupun menghimpun dana. Data OJK menunjukkan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) per November 2024 lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit (7,92% yoy vs 10,79% yoy).

Persaingan memperebutkan dana akan semakin sengit bagi semua bank, termasuk bank digital. Bank digital tidak hanya bersaing dengan sesama bank digital, melainkan juga dengan bank

konvensional yang memiliki aplikasi digital banking mumpuni.

Sebagai gambaran, jumlah pengguna aplikasi Brimo BRI, Livin Bank Mandiri telah mencapai lebih dari 27 juta per September 2024. Kelompok Bank Modal Inti di atas Rp40 triliun atau KBMI IV memiliki skala jaringan jauh lebih besar dibandingkan bank digital yang asetnya masih di bawah Rp100 triliun.

Dengan demikian, penghimpunan DPK akan menjadi tantangan bagi bank digital, terutama pendanaan murah. Sejauh ini, per November 2024 hanya 2 dari 11 bank digital yang memiliki rasio CASA di atas 50%, yaitu Seabank (65%) dan Jago (55%). Adapun 9 bank digital lainnya hanya memiliki rasio CASA 15%-40%.

Tantangan lain bagi bank digital adalah bagaimana menurunkan cost of fund. Dengan rasio CASA di bawah 50%, bank digital cenderung menawarkan bunga simpanan yang tinggi di atas LPS Rate (4,25%). Bank digital perlu terus melakukan inovasi untuk menghadirkan fitur dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Alhasil, bank tidak selalu bergantung terhadap penghimpunan dana mahal karena telah mendapat kesetiaan nasabah yang memertingkan *user experience* di atas penawaran bunga.

Dari sisi regulasi, bank digital sebagai entitas perbankan juga tetap dihadapkan pada tantangan regulasi yang semakin kompleks. Dalam hal ini, OJK maupun BI terus memperbarui regulasi seiring dengan dinamika industri yang begitu cepat.

Regulasi terkait keamanan data, perlindungan konsumen, dan anti-pencucian uang menjadi perhatian utama, ditambah ketidakpastian terkait teknologi baru seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence). Bank digital dituntut untuk mampu beradaptasi cepat dengan perubahan ini untuk menjaga operasi mereka tetap sesuai aturan.

Sejauh ini, bank digital memiliki kemitraan strategis dengan

sejumlah perusahaan pembiayaan, perusahaan e-commerce, perusahaan teknologi, maupun platform P2P Lending. Di 2025, seiring dengan kehadiran pemain-pemain baru, bank digital akan bersaing dalam menjalin kemitraan dengan sejumlah partner untuk menggenjot penyaluran pinjaman. Di samping itu, perubahan lansekap di industri di mana beberapa perusahaan pembiayaan diakuisisi oleh sejumlah bank besar juga membuat bank digital harus mencari partner baru.

Dengan demikian, bank digital ditantang untuk mampu melakukan diversifikasi dalam penyaluran kredit dengan tidak mengandalkan beberapa partner atau beberapa sektor tertentu. Tentu perbankan juga sadar bahwa konsentrasi portofolio yang terlalu tinggi pada sektor tertentu akan mengganggu kesehatan bank

Tantangan di tahun 2025 menuntut bank digital untuk lebih inovatif, adaptif, dan resilien dalam menghadapi dinamika pasar yang cepat berubah.





PT. JOTUN INDONESIA

Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.03/2009, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015 tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. PT Jotun Indonesia, NPWP No. 0010 7117 4505 2000 yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok KK-1 Jatiwangi, Cikarang Barat Bekasi, dengan ini mengumumkan Piutang Yang nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun buku 2024 sebesar Rp. 8,604,771,756,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA DEBITUR	NPWP	ALAMAT	PLAFON UTANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH PIUTANG TIDAK TERTAGIH (Rp)
CV. RIDHA JAYA PRIMA	01.775.433.4-418.000	JL. GN.BROMO BLOK D6/9 PEM BUGEL INDAH TANGGERANG	150.000.000	137.601.038
PT. TANJUNG RAYA PRIMA	02.338.619.6-412.000	RAFFLES HILLS BLOK A2 NO.14 RT.001 RW.005 HARJAMUKTI CIMANGGIS DEPOK 16954	100.000.000	80.454.000
PT. FARKINDO INTI SARANA	66.864.227.5-005.000	RAYA KALIBATA NO.15A RT.002 RW.007 KEL.CILILITAN KEC. KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA	300.000.000	273.818.600
PT. TRIDERRICK BUANA INDONESIA	76.973.256.1-225.000	KOMPLEK HARAPAN INDAH C1 NO.8 RT.004 RW.012 SADAI BENGKONG KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU	150.000.000	111.061.610
PT. TRIMATRA ANUGRAH MANDIRI SEJAHTERA	31.408.090.4-411.000	PAMULANG VILLA CD.5/2 RT.010 RW.017 PONDOK BENDA PAMULANG TANGERANG SELATAN BANTEN	100.000.000	68.490.926
ARDY MASOFANI	-	JL.DAAN MOGOT KOMP.TAMAN KOTA B1.3 KEMBANGAN 11610 JAKARTA BARAT	100.000.000	16.000.000
CV. QUALITY SERVICE BORNEO	80.493.356.2-724.000	JL. LABU PUTIH PERUM LEMBAHKENCANA PERMAI NO.03 RT.019GUNUNG ELAI, BONTANG UTARAKOTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR	200.000.000	200.000.000
CV. PUSAKA PRIMA JAYA	02.073.526.2-724.000	JL. BERINGIN I NO.48 RT.11 TANJUNG LAUT-BONTANG SELATAN BONTANG	250.000.000	219.844.000
PT. HYPEC INTERNATIONAL	03.078.960.6-036.000	APL TOWER 26TH FLOOR SUITE 2 JL. LETJEND S. PARMAN KAV. 28 TANJUNG DUREN SELATAN GROGOL PETAMBURAN JAKARTA	300.000.000	270.462.000
CV. PERMATA DEWI	86.045.168.1-723.000	JL. LILI 3 RT. 057 KARANG ANYAR TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN KALIMANTAN UTARA	500.000.000	531.780.900
PT. INTI TEKNIK PROTEK-SINDO	93.046.890.5-036.000	SOHO CAPITAL LANTAI 19, JL LETJEN S PARMAN KAV 28 RT. 003 RW. 005 TANJUNG DUREN SELATAN GROGOL PETAMBURAN JAKARTA 11470	2.500.000.000	2.616.450.480
PT. KREATUR PERFORMA SINERGI	83.784.606.2-034.000	KOMPLEK MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C6 NO. 38 CENGKARENG TIMUR CENGKARENG JAKARTA BARAT DKI JAKARTA	2.500.000.000	2.461.715.000
PT. BANGUN INTI SUKSES INDONESIA	90.911.608.9-729.000	KOMP. BALIKPAPAN REGENCY, RUKO DE ROYALE BLOK. H2 NO. 011 RT. 043 SEPINGGAN BARU BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN KALTIM	650.000.000	635.142.725
PT. CITILITE BUANAPUTRA	01.566.413.9-026.000	JL. PANGERAN JAYAKARTA 119 NO. 15 RT.006 RW.007 MANGGA DUA SELATAN,SAWAH BESAR - JAKARTA PUSAT	150.000.000	110.830.000
PT. BINTANG PERSADA SATELIT	02.996.770.0-121.000	JL.B HAMID GG.LADANG/GG.PERDAMAIAAN NO. 34 RT. RW. KEDAI DURIAN MEDAN JOHOR - KOTA MEDAN	700.000.000	679.910.000
CV. SHEVA RAYA	91.925.021.7-203.000	JALAN LINTAS SUMATERA SIMPANG 4 KOTOBARU JORONG SUNGAI LUKIKKOTO BARU, KOTO BARU KAB. DHARMASRAYA SUMATERA BARAT	200.000.000	170.492.957
TOKO SABAR ABADI	-	JALAN DIPONEGORO NO. 64 POKOH WONOBOYO WONO-GIRI 57615	100.000.000	20.717.520
JUMLAH				8.604.771.756

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat pada pembukuan Perusahaan yang telah dibebankan dalam laporan keuangan komersial dan daftar tersebut akan diserahkan ke kantor Pelayanan Pajak PMA I, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPH Badan sebagai lampiran.

Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia

Sutan Emir Hidayat - Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)



Pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Faktor utama yang mendorong perkembangan ini adalah besarnya potensi pasar, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan syariah turut berkontribusi dalam pertumbuhan sektor ini.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024, Indeks Literasi Keuangan Syariah Indonesia mencapai 39,11 persen, meningkat tajam dari dua tahun sebelumnya yang hanya 9,14 persen. Peningkatan ini merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, terutama melalui wadah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.



Kolaborasi ini semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam kebijakan ini, aspek ekonomi dan keuangan syariah diakomodasi secara menyeluruh untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Penguatan sektor ini juga dilakukan dengan meningkatkan posisi Indonesia

dalam industri keuangan syariah global, di mana aset keuangan syariah dunia yang pada 2021/2022 mencapai US\$3,9 triliun diproyeksikan tumbuh hingga US\$5,9 triliun pada 2025/2026.

Selain itu, ekonomi syariah juga menjadi bagian dalam Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dokumen ini menekankan penguatan sektor keuangan syariah, mencakup perbankan syariah, industri keuangan non-bank syariah, pasar modal syariah, serta dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Semua upaya ini didukung dengan regulasi dan penguatan kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

TUMBUH SOLID, FUNDAMENTAL SEMAKIN KOKOH

Perbankan syariah memainkan peran penting dalam pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia. Pada tahun 2024, industri ini menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan aset sebesar 12,5 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 10,49 persen.

Hingga September 2024, pangsa pasar perbankan syariah tercatat sebesar 7,44 persen dari total aset perbankan nasional, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 7,27 persen. Secara keseluruhan, total aset perbankan syariah mencapai Rp919,83 triliun, mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, pangsa pasar perbankan syariah secara keseluruhan masih tergolong kecil dibandingkan total aset perbankan nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penciptaan infrastruktur ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat. Selain itu, perbankan syariah harus terus berinovasi untuk menarik lebih banyak nasabah agar menggunakan produk dan layanan berbasis syariah. Dalam konteks ini, digitalisasi menjadi elemen kunci dalam inovasi perbankan syariah, dengan pengembangan berbagai aplikasi perbankan berbasis teknologi terkini.

Digitalisasi yang bertumpu pada pengembangan aplikasi tentu bukan hanya sekedar pelengkap atau asal ada. Layanan keuangan digital bank syariah juga harus mumpuni, setara dengan aplikasi bank digital konvensional dan mengadopsi teknologi terkini. Dengan cara ini, produk dan jasa keuangan bank syariah selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Digitalisasi telah menjadi pendorong utama dalam inovasi produk dan layanan perbankan

Pada tahun 2024, industri ini menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan aset sebesar 12,5 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 10,49 persen.

syariah. Beberapa langkah transformasi yang telah dilakukan, salah satunya dengan pengembangan dan peluncuran Super Apps Perbankan Syariah. Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah merilis aplikasi yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah, dompet digital halal, serta fitur investasi. Aplikasi Jago App dari Bank Jago Syariah juga telah dikembangkan dan diluncurkan dengan dirancang agar dapat disesuaikan dan dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan nasabah, memastikan fleksibilitas dalam penggunaan layanan.

Selain itu, beberapa bank daerah syariah mulai mengadopsi tekno-

logi *blockchain* untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi keuangan syariah. Adopsi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah, tetapi juga memungkinkan jangkauan layanan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan di daerah pedesaan.

Walaupun perkembangannya menunjukkan tren positif, perbankan syariah masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat. Masih terdapat persepsi negatif terhadap perbankan syariah, seperti anggapan bahwa sistemnya tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau biaya pembiayaan yang lebih tinggi. Kemudian, adanya kompetisi dengan bank konvensional. Untuk itu, perbankan syariah perlu terus menawarkan keunggulan kompetitif agar dapat menarik lebih banyak nasabah. Selain itu, berkaitan dengan penguatan regulasi dan infrastruktur, diperlukan kebijakan yang lebih kuat serta peningkatan infrastruktur digital agar industri ini dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Sejumlah negara, termasuk Malaysia, telah menerapkan kebijakan afirmatif guna memperluas jangkauan perbankan syariah. Indonesia dapat mengambil langkah serupa dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menempatkan dana pemerintah, baik dari APBN maupun APBD pada bank-bank syariah.

Penempatan dana yang signifikan akan meningkatkan likuiditas dan kapasitas pembiayaan bank syariah, sehingga mereka dapat lebih kompetitif dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah juga dapat mendorong atau memberikan insentif kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah.

Dengan adanya kebijakan ini, transaksi keuangan dan pengelolaan dana dari lembaga-lembaga tersebut akan semakin banyak yang beralih ke bank syariah, sehingga meningkatkan aset dan daya saing sektor ini.

Pemerintah juga dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang telah *go public* untuk memanfaatkan fasilitas keuangan syariah, seperti penerbitan sukuk, pembiayaan berbasis syariah, dan investasi syariah. Dengan demikian, produk keuangan syariah akan semakin dikenal dan digunakan oleh kalangan bisnis yang lebih luas.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, komunitas bisnis, dan organisasi keagamaan guna meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan syariah diharapkan meningkat secara signifikan.



KESIMPULAN

Keuangan syariah di Indonesia memiliki prospek yang cerah, didukung oleh peningkatan literasi keuangan, inovasi digital, dan regulasi yang semakin kuat. Meskipun perbankan syariah mengalami pertumbuhan positif, tantangan seperti pangsa pasar yang masih kecil dan kurangnya pemahaman masyarakat perlu diatasi dengan strategi yang tepat. Melalui inovasi, penguatan regulasi, serta sosialisasi yang lebih luas, industri keuangan syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.



Program Asta Cita Butuh Dukungan Perbankan

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022–2027

Tahun 2024 menjadi tahun penuh tantangan dengan faktor global sebagai pemicu dominan. Mulai dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Eropa Timur hingga muncul ketidakpastian baru yang dipicu oleh hasil pemilu di Amerika Serikat. Terpilihnya Donald Trump dengan visi *America First* dan rezim proteksionismenya berpotensi mengubah lanskap ekonomi global.

Di sisi lain, narasi *green energy*, *green financing* terancam meredup sebagai imbas pilihan strategis Trump di sektor energi yang bakal memaksimalkan sumber energi berbahan fosil.

Efek Trump juga sudah terlihat di pergerakan nilai tukar mata uang dunia versus US\$ dollar. Di pasar modal, Wallstreet (bursa Nasdaq, S&P 500) beberapa kali mencetak rekor baru, menyiratkan optimisme tinggi para pelaku pasar terhadap prospek ekonomi AS di bawah pemimpin baru. Tetapi, di balik optimisme tinggi itu, terselip kekhawatiran tentang inflasi yang berdampak langsung pada kebijakan suku bunga.

Industri keuangan dan perbankan di tanah air terus bertumbuh secara sehat dengan fundamental yang semakin baik. Daya tahan sektor ini sudah teruji sangat baik sejak berhasil pulih dari krisis

saat pandemi. Industri perbankan juga telah memainkan peran yang krusial dan signifikan dalam membantu pemerintah mencapai tujuan besarnya.

Kini, dukungan itu kembali diharapkan dalam membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merealisasikan *Asta Cita* untuk membawa Indonesia ke kondisi yang semakin baik.

Bagaimana pandangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengevaluasi perjalanan industri perbankan di 2024 dan seperti apa harapan terhadap industri ini di tahun yang baru? Berikut pandangan Bapak Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022–2027, yang kami catat dari berbagai pernyataan di publik.

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK

Pada tahun 2024, kondisi ekonomi global dan domestik menghadirkan tantangan signifikan bagi sektor perbankan. Dari sisi global, ancaman resesi di Amerika Serikat dan Eropa, ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina, serta meningkatnya risiko keuangan terkait perubahan iklim mem-

pengaruhi stabilitas sektor keuangan. Di sisi domestik, tekanan inflasi, dampak kebijakan suku bunga yang tinggi, serta transisi pemerintahan baru turut memberikan dinamika tersendiri yang mempengaruhi perencanaan dan operasional bank. Selain itu, upaya pemulihan ekonomi pascapandemi menghadirkan peluang, meskipun masih dibayangi risiko eksternal.

TRANSFORMASI DIGITAL

Perbankan Indonesia berada di tengah gelombang transformasi digital yang cepat, memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, dan adopsi mata uang digital oleh bank sentral. Inisiatif digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menghadirkan tantangan baru seperti ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks, risiko keamanan data pelanggan, dan kebutuhan akan perlindungan konsumen yang lebih baik. Dalam menghadapi era ini, bank dituntut untuk memperkuat kemampuan resiliensi digital guna memastikan keamanan operasional dan kepercayaan nasabah.

AKSES KEUANGAN TERHADAP UMKM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk meningkatkan akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penyusunan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang bertujuan memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. RPOJK ini akan mencakup kebijakan khusus, termasuk skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis UMKM, serta percepatan proses penyaluran pembiayaan. Selain itu, bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) didorong untuk berkolaborasi dalam memberikan kemudahan akses

pembiayaan kepada UMKM, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong ekosistem digital dalam pembiayaan UMKM.

PENGUATAN DAN KONSOLIDASI BPR/BPRS

OJK terus melakukan upaya penguatan dan konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sesuai dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Sepanjang tahun 2023, jumlah BPR menurun sebanyak 33 unit, yang sebagian besar disebabkan oleh penggabungan atau peleburan dengan BPR lain dalam rangka penguatan permodalan. Meskipun secara kuantitas BPR berkurang, jumlah keseluruhan kantor tidak jauh berbeda, mengingat dalam proses penggabungan atau peleburan, kantor cabang masing-masing secara umum menjadi kantor cabang dari BPR yang melakukan penggabungan.

Untuk memperkuat industri BPR dan BPRS, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 (RP2B 2024-2027). Roadmap ini bertujuan mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya. RP2B 2024-2027 terdiri atas empat pilar utama: penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi, penguatan peran terhadap wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

PERAN PERBANKAN DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Dalam sektor pasar modal, industri perbankan berperan dalam menerbitkan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan, seperti Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP). EBA-SP adalah surat berharga yang terdiri dari sekumpulan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. Berdasarkan data Bursa Efek

Indonesia per 13 Januari 2025, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp2,21 triliun. Instrumen ini melengkapi sumber pendanaan dan menjamin stabilitas likuiditas bank.

KEBIJAKAN OJK DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN PERUMAHAN

OJK mendukung program pemerintah terkait penyediaan rumah bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui program 3 juta hunian. Dalam proses pemberian KPR, OJK memberikan ruang bagi Lembaga Jasa Keuangan untuk mengambil kebijakan pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan *risk appetite* dan pertimbangan bisnis. Kebijakan ini mencakup perhitungan pembobotan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kredit sejalan dengan tingkat *Loan to Value* (LTV), penetapan kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, serta pengecualian perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada MBR.

PROYEKSI PERTUMBUHAN KPR

Data menunjukkan bahwa KPR yang disalurkan perbankan masih menunjukkan pertumbuhan. Perbankan juga memproyeksikan pertumbuhan kredit ke depan yang cukup positif. Namun, bank tetap perlu menjaga kondisi likuiditasnya, terutama yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dan menerapkan manajemen risiko yang baik dalam pengelolaan dana masyarakat, mengingat tanggung jawab moral bank dalam menyalurkan dana pada kegiatan produktif.

DINAMIKA SUKU BUNGA KPR

Suku bunga KPR secara umum mengikuti pergerakan suku bunga kredit yang diberikan perbankan. Pergerakan tingkat suku bunga dipengaruhi berbagai faktor, termasuk dinamika perekonomian global, fluktuasi perdagangan, harga komoditas, tingkat inflasi, dan kebijakan suku bunga di berbagai yurisdiksi.

Meskipun demikian, minat terhadap KPR diproyeksikan tetap tumbuh seiring dengan dukungan program pemerintah yang mendorong penguatan daya beli masyarakat dan bauran kebijakan yang mendorong ekspansi kredit perbankan.

INSENTIF BAGI BANK DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH

OJK dan pemerintah akan terus berkomunikasi dalam implementasi berbagai program strategis, termasuk penyediaan 3 juta unit rumah. OJK senantiasa mendorong perbankan agar tetap optimal dalam perannya sebagai agen pembangunan nasional. Program penyediaan 3 juta rumah memiliki target pasar yang jelas, yaitu MBR dengan penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan untuk pembiayaan KPR rumah tapak dan susun dengan jangka waktu hingga 20 tahun. Bank dapat memperhitungkan subsidi uang muka sehingga rasio kredit (LTV) calon debitur MBR dapat meningkat. Diharapkan dengan insentif yang menarik tersebut, perbankan dapat mengoptimalkan pencapaian program 3 juta rumah.

PENERAPAN TATA KELOLA DAN STRATEGI ANTI-FRAUD

Guna menguatkan integritas industri BPR dan BPRS, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan BPRS, serta POJK Nomor 12

Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Regulasi ini bertujuan memperkuat sistem pengendalian internal melalui penerapan strategi anti-fraud, sehingga upaya pencegahan dan perbaikan yang berkelanjutan pada sistem pengendalian internal dapat meminimalkan risiko terjadinya kecurangan.

PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN SPIN-OFF UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

OJK senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi perbankan, termasuk di industri perbankan syariah, yang dilakukan antara lain melalui spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) yang disertai dengan pengga-

OJK senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi perbankan, termasuk di industri perbankan syariah melalui spin-off Unit Usaha Syariah (UUS)

bugan usaha agar menghasilkan Bank Umum Syariah yang lebih sehat dan dengan skala usaha lebih besar. Pada prinsipnya, *spin-off* bertujuan untuk mendorong UUS melakukan berbagai pengembangan dan penyesuaian proses bisnis, termasuk penguatan aspek kelembagaan dalam rangka menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing.

Saat ini, terdapat dua UUS yang telah memenuhi kewajiban *spin-off* sesuai dengan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, yaitu yang memiliki nilai

aset UUS yang telah mencapai 50% dari total aset bank umum konvensional induknya dan/atau jumlah aset unit usaha syariahnya paling sedikit Rp50 triliun. Sesuai dengan POJK tersebut, diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk mengajukan permohonan izin setelah kriteria tersebut dipenuhi. Kedua UUS tersebut saat ini dalam proses melakukan berbagai persiapan, mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya, serta telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OJK dan lembaga terkait.

SUSTAINABLE FINANCE

OJK terus memperkuat inisiatif keuangan berkelanjutan melalui implementasi *roadmap* tahap kedua (2021-2025). Upaya ini mencakup pengembangan taksonomi keberlanjutan, pelaporan manajemen risiko iklim, dan panduan manajemen risiko terkait perubahan iklim. Tujuannya adalah mendorong perbankan untuk mendukung pembiayaan ramah lingkungan yang berkontribusi pada target emisi nol bersih.

STABILITAS DAN KINERJA PERBANKAN INDONESIA

Menutup tahun 2024, sektor perbankan Indonesia kembali menunjukkan daya tahan (*resilience*) di tengah ketidakpastian global dan tantangan ekonomi domestik. Melalui strategi yang inovatif dan responsif, industri perbankan

berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung aktivitas ekonomi, dan memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak sebagai salah satu pilar utama dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. OJK terus mencermati perkembangan volatilitas ekonomi global dan dampaknya kepada ekonomi domestik serta perbankan Indonesia.

Hingga November 2024, likuiditas perbankan berada dalam kondisi

AL/NCD
(Asset Liability to Net Cash Demand Deposit):
112,94%

AL/DPK
(Asset Liability to Third Party Funds): 25,57%

Liquidity Coverage Ratio (LCR): 213,07%

Loan to Deposit Ratio (LDR): 87,34%

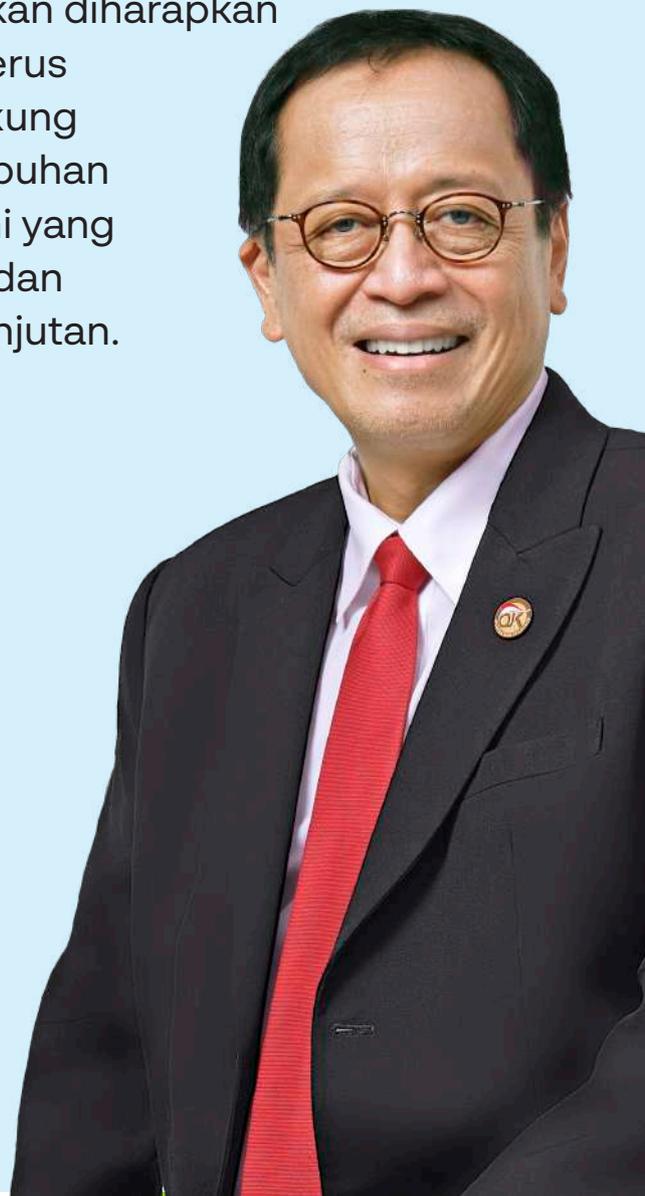
yang memadai. Hal ini tercermin dari beberapa indikator utama:

Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit, termasuk dalam mendukung program 3 juta rumah. Namun, bank tetap diharapkan menerapkan manajemen risiko yang prudent dalam aktivitas operasionalnya saat berpartisipasi dalam program pemerintah tersebut, sehingga kondisi likuiditas tetap terjaga.

Sumber: pemberitaan media, Siaran Pers OJK, FGD Redaktur, Konferensi Pers

KESIMPULAN

Industri perbankan Indonesia pada 2024 berhasil menjaga stabilitas di tengah berbagai tantangan. Kebijakan strategis dari OJK seperti penguatan sektor UMKM, transformasi digital, keuangan berkelanjutan, dan konsolidasi perbankan syariah menjadi fondasi untuk menghadapi 2025 dengan optimisme. Dengan berfokus pada inovasi, tata kelola yang baik, dan kolaborasi antar lembaga, sektor perbankan diharapkan dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Kegiatan KOMITE MASYARAKAT PERBANKAN PEDULI (KMPP) PERBANAS



KOMITE MASYARAKAT PERBANKAN PEDULI (KMPP) PERBANAS menyelenggarakan kegiatan Literasi Keuangan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada 29 November 2024 dengan topik "Cerdas dalam Pemahaman Pelindungan Data Pribadi". Kegiatan ini dihadiri lebih kurang 150 mahasiswa ITS. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ibu Vera Eve Lim selaku Ketua KMPP PERBANAS. Narasumber dalam kesempatan adalah Bapak Firdaus Aditya Rizqi selaku Deputy Direktur Layanan Manajemen Strategis dan

Koordinasi Regional Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Ibu Aviliani selaku Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Perbankan PERBANAS, dan Ibu Lily Wongso selaku Executive Vice President IT Architecture, Data Management & Service Quality Group BCA.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS dan Pengurus PERBANAS.

Seminar Kesehatan PERBANAS Kediri-Madiun



Menjaga Kesehatan Jantung untuk Hidup yang Berkualitas adalah topik Seminar Kesehatan yang dilaksanakan oleh PERBANAS Kediri-Madiun pada 7 Desember 2024. Hadir dalam kesempatan tersebut, selain Pengurus PERBANAS Kediri-Madiun juga anggota PERBANAS Kediri-Madiun dan daerah sekitarnya.



Perbanas Sulawesi Selatan Bakti Sosial



PERBANAS Daerah Sulawesi Selatan telah melakukan Bakti Sosial "Pemasangan Filter Air Langsung Minum" di Panti Asuhan Murni di Jalan Arif Singa No. 81, Kota Makassar pada 13 Desember 2024.

PERBANAS Aksi Penghijauan di Wonorejo



Sebagai wujud kepedulian pada lingkungan, Komite Masyarakat Perbankan Peduli (KMPP) PERBANAS kembali melakukan aksi penghijauan di Kebon Bibit Wonorejo, Surabaya pada 28 November 2024. Dalam kesempatan tersebut KMPP bekerja sama dengan PERBANAS Daerah Jawa Timur.

Bibit yang ditanam adalah Tabebuaya sebanyak 50 pohon. Dalam sambutannya, Ibu Vera Eve Lim selaku Ketua KMPP PERBANAS menyampaikan bahwa menanam bukan hanya memindahkan bibit untuk ditanamkan di tanah, tapi juga harus merawat dengan penuh kasih sayang sehingga nantinya dapat dirasakan manfaatnya untuk generasi mendatang.



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK RAYA INDONESIA Tbk.

Sesuai pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh Nomor 36 tahun 2008 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini PT Bank Raya Indonesia Tbk. mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun 2024 sebagai berikut :

Tahun 2024

Rp. 265.528.822.624,37

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2024 sebagai lampiran.



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Tahun 2024 sebagai berikut:

Tahun 2024

Rp2.326.650.304.189,00

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat pada pembukuan Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2024 sebagai Lampiran.

TINGKATKAN POTENSI ANDA BERSAMA PERBANAS INSTITUTE

Wujudkan Potensi Anda dengan Program Studi:

- Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk)
- Magister Manajemen
- Magister Akuntansi
- Doktor Manajemen Berkelanjutan

Jadilah Pemimpin di Masa Depan dengan:

- Kurikulum Terkini yang Relevan dengan Perkembangan Industri
- Dosen Berkualitas dengan Pengalaman Profesional
- Waktu Kuliah yang Fleksibel



**BEASISWA
MENCAPAI 25%***



Informasi:
0851 7985 3803



admisi.perbanas.id